

## Kemiskinan Pekerja Perempuan dan Sektor Informal di Sarkem

Muhammad Supraja<sup>1</sup> dan Odam Asdi Artosa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup>Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

<sup>1</sup>Korespondensi Penulis: praja3@ugm.ac.id

### ABSTRAK

Pasar Kembang merupakan salah satu distrik sektor informal yang besar di Yogyakarta, dimana wilayah bisnisnya terbagi menjadi dua bagian yaitu kawasan sektor informal sah dan tidak sah. Tujuan penelitian untuk ini memberikan gambaran mengenai partisipasi pekerja perempuan dalam sektor informal di Pasar Kembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Eksplorasi data dengan studi literatur. Sebanyak delapan pekerja perempuan dengan rentang usia 17-51 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam paradigma kemiskinan, perempuan yang dianggap berhasil adalah perempuan yang mampu berkarir di sektor publik dan berkontribusi dalam perekonomian keluarga. Namun, paradigma ini mengesampingkan posisi pekerja perempuan yang tidak memiliki keterampilan dan *stock of knowledge* yang memadai, sehingga kelompok ini seringkali terpinggirkan dan terserap dalam sektor informal tidak sah yakni Pekerja Seks komersial (PSK). Sektor informal sah bergerak dibidang jasa pariwisata dan sektor informal tidak sah yang aktivitas perekonomiannya bergerak pada bidang prostitusi. Meskipun demikian, kedua kawasan ini berhasil menjalin hubungan simbiosis mutualisme, dimana keberadaan masing-masing sektor dapat saling mendukung dan menguntungkan. Secara umum, hasil studi ini menambah dan memperkaya perdebatan akademik mengenai pekerja perempuan dalam pasar kerja informal.

**Kata kunci:** Sektor Informal; Pekerja Perempuan; Sarkem; PSK; Prostitusi.

### ABSTRACT

*Pasar Kembang is one of the large informal sector districts in Yogyakarta—where the business area is divided into two areas This research an overview of the of female workers in the informal sector. Data exploration of this article uses a phenomenological approach and literature study. Informants in this study involved eight female workers an age range of 17-51 years. The findings in this study show that: in the poverty paradigm, women who are considered successful are women who are able to have careers in the public sector and contribute to the family economy. However, this paradigm overrides the position of women workers who do not have adequate skills and knowledge, so that this group is often marginalized and absorbed in the informal sector. The legal informal sector whose economic activity is engaged in tourism services. Then, the illegal informal sector whose economic activity is engaged in prostitution. These two regions have succeeded in establishing a symbiotic relationship of mutualism, in which the existence of each sector can mutually support and give benefit. In general, this article enriches the academic debate regarding women workers in the informal labor market.*

**Keyword:** Informal Sector; Women Workers; Sarkem; PSK; Prostitution

### Informasi Artikel:

Diterima: April 2023 Direvisi: Mei 2023 Diterbitkan: Juni 2023

---

**PENDAHULUAN**

Keberadaan sektor informal di Indonesia menjadi sebuah paradoks yang dilematis dalam pembangunan nasional. Di satu sisi, sektor informal menjadi wadah bagi para pekerja yang tidak terserap dalam sektor formal dan mampu menjadi alternatif penghidupan dan mengurai angka pengangguran yang ada (Asian Development Bank dan BPS 2011). Di sisi lain, keberadaan sektor informal memiliki wajah gelap, dimana kesenjangan dan ketimpangan sosial terpancarkan dari upah yang diterima oleh para pelaku dan/atau pekerja di sektor informal (Akbar 2022). Dari aspek tata ruang wilayah, sektor informal juga seringkali dianggap dan diberikan stigma sebagai pengganggu tata tertib karena keberadaannya yang menjamur di setiap sisi dan sudut kota. Sifatnya yang fleksibel terhadap pasar kerja, sektor informal menjadi sebuah alternatif bagi para pekerja ketika pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang mumpuni.

Namun, fleksibilitas ini terkadang memberikan pilihan-pilihan aktivitas ekonomi yang beragam dan tidak seluruhnya mampu diterima oleh norma sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh penjual minuman keras dan obat-obatan terlarang juga termasuk di dalamnya. Akan tetapi, aktivitas ini melanggar aturan hukum dan norma sosial, sehingga masih sulit diterima oleh masyarakat secara umum.

Menariknya, Pasar Kembang sebagai wilayah yang syarat dengan aktivitas perekonomian juga memiliki banyak pelaku sektor informal. Beberapa pelaku sektor informal yang dapat ditemui di lokasi ini antara lain penjual makanan, penjaga parkir, penyedia rumah inapan, penjual minum keras, pekerja seks komersial, mucikari, hingga keamanan (lihat Artosa 2018). Oleh karena itu, untuk mengelompokkan jenis-jenis sektor informal ini ke dalam batasan yang jelas, Hart (1985) membagi sektor informal ke dalam dua kategori, yaitu sektor informal

sah (*legal*) dan sektor informal tidak sah (*illegal*). Dengan pembagian jenis sektor informal seperti pada penjelasan di atas, maka karakteristik dan sifat pekerjaan yang tersedia di Pasar Kembang mulai dapat diidentifikasi. Misalnya, sektor informal tidak sah, jika merujuk pada Effendi (1995) diartikan sebagai aktivitas perekonomian yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, misalnya adalah kegiatan penggelapan barang, prostitusi, perjudian, dan tindakan jual beli dari hasil kriminal lainnya. Kemudian, sektor informal sah diartikan sebagai sebuah aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, beberapa contohnya adalah pedagang makanan, penjual pakaian, penjaga parkir, dan lain-lain.

Adanya sektor informal sah dan tidak sah di Pasar Kembang memberikan berbagai dampak sosial-ekonomi terhadap area di sekitarnya. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan tentang Pasar Kembang adalah prostitusinya. Meskipun tergolong ke dalam sektor

informal tidak sah, prostitusi merupakan penyelamat bagi banyak perempuan yang tidak memiliki kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh sektor formal. Keterbatasan kemampuan menjadi kendala tersendiri bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang “lebih layak”, sehingga jalan alternatifnya adalah terjun ke dalam dunia prostitusi. Selain itu, terdapat desakan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan tidak bisa ditoleransi. Dengan menonjolkan penampilan, mereka mengkomodifikasi tubuh sebagai modal utama. Dari hingar bingar gemerlap dunia malam, mereka mendapatkan arena untuk memperoleh penghasilan.

Keberadaan Pasar Kembang sebagai pusat aktivitas sektor informal juga tak jarang memusingkan pemerintah. Selain aktivitas utama prostitusi, di sekitarnya juga terdapat para pelaku sektor informal lainnya yang menyambung hidup mereka di sana. Beberapa contoh diantaranya adalah pedagang kaki lima dan parkir kendaraan yang masih ditemui di

area Pasar Kembang, khususnya sisi utara. Meskipun demikian, aktivitas ini telah memberikan mereka penghidupan dan menghindarkan mereka dari jurang kemiskinan. Apalagi bagi perempuan usia kerja yang tidak memiliki keahlian sama sekali—untuk bersaing masuk dalam sektor formal akan menjadi kesulitan tersendiri. Keadaan ini diperparah dengan tingkat kualifikasi masuk sektor formal yang semakin tinggi karena banyaknya jumlah lulusan perguruan tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bertujuan untuk melihat dan memetakan partisipasi pekerja perempuan dalam sektor informal di Pasar Kembang. Lebih jauh, pembahasan dalam tulisan ini juga menjajaki bagaimana peran negara dalam melakukan kontrol terhadap sektor informal melalui ragam kebijakan yang ada, khususnya terhadap sektor informal tidak sah yang ada di Pasar Kembang. Selain itu, artikel ini juga diharapkan memberi kontribusi dalam perdebatan akademik mengenai partisipasi perempuan

dalam sektor informal—yang selama ini menjadi sebuah isu yang ramai dibicarakan dalam kerangka pembangunan dan ketenagakerjaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam proses pengumpulan data, studi ini melibatkan delapan informan utama yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) tergolong dalam usia angkatan kerja; (2) berjenis kelamin perempuan; serta (3) melakukan pekerjaan dan aktivitas ekonomi di wilayah pasar kembang. Adapun dari delapan informan tersebut terbagi ke dalam komposisi sektor informal tidak sah dan sektor informal sah—yang masing-masing diwakili oleh empat informan. Informan dalam sektor informal tidak sah terdiri dari: mucikari, pekerja seks komersial, *ladies club*, dan penjual minuman beralkohol. Kemudian informan dari sektor informal sah adalah penjual nasi, pemilik warung kelontong, pemilik losmen, dan penjaga parkir.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam ke setiap informan untuk melihat pengalaman/fenomena intersubjektif yang dilihat dari masing-masing sudut pandang informan. Potret ini kemudian menjadi sebuah narasi yang digunakan untuk memberikan gambaran terkait dengan kondisi pekerja perempuan di Pasar Kembang. Guna memperdalam temuan lapangan, penulis juga mengelaborasikannya dengan data sekunder dari studi literatur mengenai laporan-laporan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Melihat Akar Sejarah dan Pertumbuhan Ekonomi Pasar Kembang

Secara historis, Pasar Kembang merupakan kawasan ekonomi yang cukup tua. Sejak masa kolonial hingga saat ini, kawasan ini selalu ramai karena berdekatan dengan beberapa sentra perekonomian di Kota Yogyakarta. Di sebelah timur Pasar Kembang, terdapat Malioboro—sebuah lokasi wisata yang menjadi *trademark* Kota

Yogyakarta. Disisi utaranya, terdapat Stasiun Tugu (dibaca: Stasiun Yogyakarta) yang menghubungkan Yogyakarta dengan kota-kota lainnya melalui akses kereta api. Pergerakan aktivitasnya banyak ditopang oleh sektor-sektor informal seperti perdagangan dan jasa. Karena letaknya yang strategis berada di pusat kota dan berdekatan dengan stasiun kereta api, maka tidak mengherankan apabila di sekitarnya terdapat banyak pedagang dan penyedia jasa (pariwisata, kuliner, hiburan, terapi, dll). Bahkan, Pasar Kembang juga menjadi salah satu zona ekonomi penyangga di Kota Yogyakarta, dimana daya tariknya mampu mengundang wisatawan dari berbagai daerah dan memberikan arus perekonomian yang cukup kuat.

Meskipun demikian, di balik sirkulasi perekonomian yang tampak sangat nyata dari sektor perdagangan dan jasa. Pasar Kembang memiliki citra lainnya yang dikenal publik sebagai kawasan wisata dunia malam. Seperti namanya, Pasar Kembang adalah tempat dimana orang

dapat membeli kembang (bunga). Di dalam sana terdapat berbagai macam kembang serta aktivitas jual-belinya. Namun, dalam pengertian ini, kembang yang dimaksud adalah pekerja perempuan yang berkecimpung dalam gemerlap dunia prostitusi.

Dalam beberapa literatur (Siswanto 2013; Artosa 2018) menyebutkan bahwa alasan Pasar Kembang menjadi sebuah lokalisasi memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Dulunya, saat pembangunan rel kereta api di masa kolonial, hiburan yang dapat dilakukan oleh para buruh pekerja rel adalah mencari kesenangan dengan para perempuan malam, dari menemani minum-minum hingga melakukan hubungan seksual. Dari aktivitas tersebut, tumbuhlah aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak aktor dan memberikan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Rutinitas ini berjalan hingga akhirnya Pasar Kembang dikenal oleh publik sebagai zona hitam perekonomian di Yogyakarta.

Seiring bergulirnya waktu, aktivitas ini masih tetap eksis dan pekerja perempuan yang terlibat di dalamnya datang dari berbagai daerah. Kebanyakan dari mereka datang dari latar belakang ekonomi serta pendidikan yang rendah. Bahkan, beberapa diantara mereka juga ada yang berasal dari perceraian keluarga dan tidak mendapatkan santunan dari mantan suami. Sehingga, untuk tetap dapat bertahan hidup, mereka memilih untuk bekerja ke dalam dunia prostitusi. Alasan lain mengapa mereka memilih jalur ini adalah terbatasnya kapasitas dan pengetahuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

### **Kemiskinan dan Ancaman Penyakit**

#### **Menular dalam Sektor Informal Tidak Sah**

Sektor informal dalam studi mengenai ketenagakerjaan dan pembangunan, memiliki berbagai istilah, seperti misalnya *informal activity*, *self employment*, *underground economy*, *black market economy*, *shadow economy*, dan

juga *causal work* (Effendi 1995; Hart 1985). Namun, secara pasti, sektor informal merupakan sektor penyangga ekonomi yang lentur dan mampu berkontribusi menyerap tenaga kerja yang cukup banyak (Subarsono, dalam Rolis, 2013:95). Dalam praktiknya, sektor informal mampu menyerap tenaga kerja besar-besaran, khususnya bagi mereka yang tidak terserap dalam sektor formal (Asian Development Bank dan BPS 2011). Meskipun demikian, beberapa pihak juga melabeli sektor informal sebagai aktivitas perekonomian yang merusak tata ruang karena keberadaannya yang melekat di trototoar jalan raya—misalnya pedagang kaki lima.

Secara khusus, kemampuan sektor informal dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan memberikan alternatif terhadap problem kemiskinan dan ketenagakerjaan. Apalagi, kemiskinan merupakan masalah besar yang dihadapi oleh Indonesia dalam hingga saat ini. Dalam beberapa studi, kemiskinan menjadi faktor penyebab munculnya fenomena

prostitusi (D'Amico 2005). Ada beberapa faktor sosio-ekonomi yang memainkan peran mengapa hal ini dapat terjadi. Secara ekonomi, kebutuhan menuntut orang untuk mencari penghasilan dan mengalokasikannya untuk menjalani kehidupan mereka—ini tidak lepas dari manusia sebagai *homo economicus*. Akan tetapi, hal ini secara sosiologis juga didorong oleh beberapa penyebab, misalnya karena keterbatasan sumber daya ekonomi, masyarakat melakukan urbanisasi untuk mendapatkan pekerjaan di kota (Saleh dkk, 2013:2). Meskipun, dalam praktiknya, seringkali hasrat mencari pekerjaan di kota tidak diimbangi dengan sosial kapital yang ada, seperti pengetahuan, keahlian, jejaring, dan sebagainya. Dengan demikian, mereka tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal dan pada akhirnya masuk ke dalam sektor informal.

Selain itu, tuntutan akan kebutuhan hidup dan biaya kebutuhan pokok yang semakin tinggi memaksa mereka untuk

mendapatkan uang dengan berbagai cara. Bagi para perempuan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak sama, pekerjaan yang dilakukan pun juga berbeda. Dengan memanfaatkan keberadaan lokalisasi Sarkem, para perempuan ini membuka usaha seperti warung makan, penjaga parkir, menjual minuman beralkohol, mucikari, PSK, hingga persewaan losmen. Praktik prostitusi di Pasar Kembang sudah berjalan sejak jaman kolonial. Keberadaan Pasar Kembang sebagai tempat prostitusi berjalan beriringan dengan pembangunan rel kereta di Yogyakarta (Siswanto dkk, 2013). Memang, secara geografis letak Pasar Kembang sangat dekat dengan Stasiun Tugu Yogyakarta. Hal ini memperkuat latar historis berdirinya Sarkem. Seiring berjalannya waktu, sarkem berdiri sebagai sebuah tempat prostitusi yang secara tidak langsung telah dilegalkan oleh masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat *mindset* yang telah digeneralisir bahwa prostitusi adalah aktivitas di dalamnya

tidak terlepas dari perbuatan yang menyimpang norma sosial. Prostitusi sendiri diartikan oleh Sahal Mahfudh (2007) adalah persenggamaan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Pandangan tersebut tampaknya juga diterima oleh sejumlah masyarakat, sehingga Sarkem seringkali mendapat stigma negatif. Padahal, aktivitas sektor informal di sana tidak melulu tentang prostitusi. Misalnya WRT (49 tahun) sudah 20 tahun berjualan makanan di dalam lokalisasi Pasar Kembang. Secara yuridis, mata pencahariannya tidak bertentangan dengan aturan hukum karena ia tidak melakukan aktivitas illegal. Namun, stigma negatif juga melekat pada dirinya tatkala ia bekerja di sana. Stigma itu justru hadir dari lingkungan di luar Pasar Kembang, seperti saudara dan tetangga-tetangganya.

*“Ya kadang merasa segan dengan tetangga karena saya kerja di tempat yang secara sosial kan banyak dicap buruk. Apalagi, sama saudara-saudara saya...”* (Wawancara WRT, 23 April 2019)

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bagaimana kuasa atas



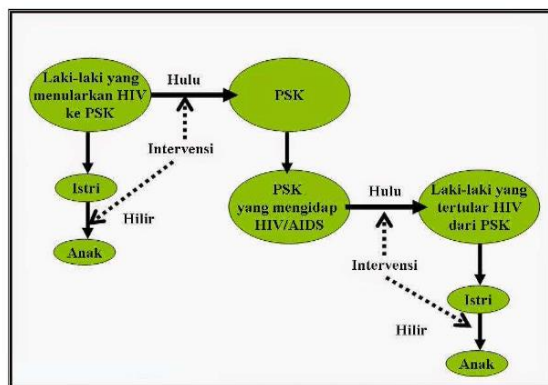
pengetahuan membentuk dan melabeli seseorang berdasarkan lingkungan dimana ia mencari pendapatan. Meskipun pada faktanya, mereka tidak selalu melakukan perbuatan-perbuatan negatif, seperti yang dikonstruksikan oleh rasionalitas manusia. pernyataan WRT sekali lagi menunjukkan bahwa kawasan sektor informal tidak sah bukan melulu soal aktivitas dan penyimpangan, tetapi juga terdapat aktor-aktor lain yang berkecimpung dalam roda perekonomian itu dan melakukan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum. Pada akhirnya, informan seperti WRT mengabaikan apa yang dipikirkan oleh saudara dan tetangganya. Desakan kebutuhan ekonomi dan kemiskinan yang menghinggapi keluarganya menuntutnya harus tetap berjualan di sana.

Dalam sudut pandang normatif, keberadaan prostitusi memang selalu dinilai meresahkan. Selain dapat menciptakan disharmonis dalam sebuah hubungan rumah tangga, prostitusi juga akan menyebabkan penularan penyakit

HIV & AIDS (Joshi dkk. 2020). Sarkem sendiri sebagai sebuah perkampungan yang dikhususkan sebagai tempat prostitusi memiliki sebuah aturan yang unik bagi pelanggan yang ingin menggunakan jasa PSK. Mereka diwajibkan untuk menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Apabila tidak menggunakan kondom saat berhubungan seks dengan para PSK di sana, maka akan dikenakan denda Rp. 25.000,- (Baca Kompas 19 Juni 2014). Kondisi ini sesungguhnya justru membuka peluang penularan HIV & AIDS secara cepat. Pasalnya demi memilih sebuah kepuasan biasanya pelanggan memilih tidak menggunakan kondom dan lebih baik dikenai denda. Seperti pendapat yang ditulis oleh Harahap dalam "AIDS Watch Indonesia" mengatakan bahwa:

*"Bagi laki-laki berkantong tebal tidak ada artinya Rp 25.000 jika dibandingkan dengan kerepotan dan kepuasan ketika bersanggama dengan PSK. Mereka akan memilih membayar denda Rp 25.000 daripada memakai kondom. Berbagai studi juga menunjukkan hanya 30 persen laki-laki hidung belang yang dengan sukarela memakai kondom setiap kali melacur"*

Apabila kondisi ini terus terjadi maka tak ayal penularan HIV & AIDS akan menyebar dan meluas dengan cepat. Peralannya, penularan virus ini terjadi dari pergantian hubungan seks yang dilakukan oleh penderitanya. Semisal seorang suami yang tertular dari seorang PSK melakukan hubungan seksual dengan istrinya, maka secara otomatis virus ini akan menular ke istri dan calon bayinya. Calon bayi berpotensi mengidap HIV karena darah keturunan yang ada dalam dirinya berasal dari induk yang menderita HIV & AIDS. Berikut ilustrasi kasus penularan HIV & AIDS yang terjadi di Indonesia.



**Gambar 1.** Skema Penularan Virus HIV  
Sumber: diolah dari Harahap (2014)

Gambar 1. memberikan ilustrasi bahwa penularan virus HIV & AIDS dapat secara mudah menyebar melalui hubungan seksual

yang dilakukan oleh penderitanya. Sehingga tidak dipungkiri penderita HIV & AIDS di Indonesia akan terus bertambah dengan adanya prostitusi, karena prostitusi dianggap sebagai tempat berkembang biaknya virus tersebut. Oleh karena itu, beberapa lokalisasi seperti Sarkem mewajibkan pelanggannya menggunakan pengaman saat berhubungan dengan PSK di sana. Jumlah penderita HIV & AIDS yang terus meningkat tampaknya perlu diresahkan, karena virus ini susah untuk diobati sehingga menyebabkan penderitanya meninggal dunia.

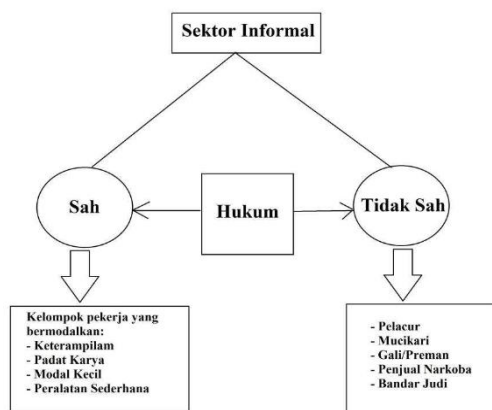
### Kontribusi Perempuan dalam Sektor

#### Informal (Sah & Tidak Sah) di Sarkem

Dalam pusaran roda ekonomi di Sarkem terdapat peran perempuan yang cukup besar didalamnya. Perempuan memiliki andil penting dalam kegiatan tersebut, lihat saja hampir semua PSK di Sarkem berjenis kelamin perempuan. Namun yang ingin dibahas dalam tulisan ini—perempuan yang dimaksud di Sarkem bukan hanya para PSK saja tetapi juga para

aktor lain seperti pedagang kaki lima (makanan, minuman, rokok, dll), penyedia losmen, calo, penjaga parkir, dan lain-lain. Analisis mengenai peran perempuan dalam tulisan ini menjadi menarik karena dominasi jumlah perempuan yang bergelut dalam sektor informal di Sarkem cukup tinggi.

Dalam bukunya “Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan”, Effendi (1995) menjelaskan secara tegas pembagian sektor informal secara pendapatan.



**Gambar 2.** Kategorisasi Sektor Informal  
Sumber: diolah dari Effendi (1995)

Skema 2. menggambarkan bahwa sektor informal terbagi menjadi dua bagian berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Pertama adalah menurut pendapatan yang

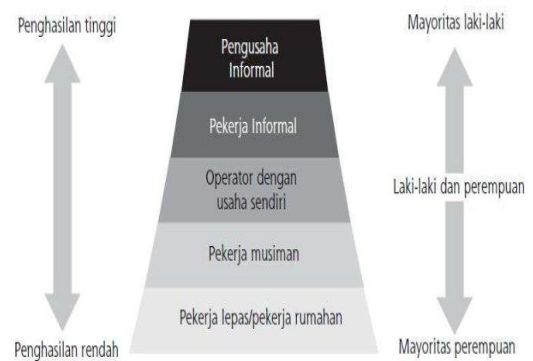
sah, sektor ini adalah sektor yang keberadaannya tidak mengganggu tatanan nilai dan norma sosial. Contoh dari sektor ini adalah pedagang makanan kaki lima (makanan, minuman, rokok, dll), penjaga parkir, pengolah WC umum, penjaga kebersihan, dan lain-lain. Kedua adalah menurut pendapatan yang tidak sah, sektor ini adalah sektor yang keberadaannya mengganggu dan merusak tatanan nilai dan norma sosial. Contoh dari sektor ini adalah PSK, Mucikari, Gali/Preman, Pengedar Narkoba, Bandar Judi, dll. Adanya pelaku dalam sektor informal tidak sah seperti PSK di Sarkem memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, karena selain PSK yang memperoleh pendapatan, para pelaku sektor formal sah lainnya juga memperoleh pendapatan dari kunjungan para ‘pembeli’ yang berkunjung di Sarkem.

Peranan perempuan dalam pasar kerja informal ini cukup menarik karena perempuan menjadi tameng kemiskinan. Perempuan yang sebelumnya hanya

dianggap sebagai ‘konco wingking’ (teman di kamar dan dapur) mampu melakukan perubahan untuk bekerja di sektor publik dan mendorong perekonomian keluarga. Perempuan-perempuan pelaku sektor informal yang ada di Sarkem ini juga merasa diuntungkan karena dengan keberadaan mereka di sektor publik, mereka memiliki pendapatan sendiri. Bahkan, keberadaan kawasan prostitusi Sarkem dirasa menguntungkan bagi masyarakat yang berjualan dan membuka toko ataupun warung di dalamnya. Kondisi ini dikarenakan para pedagang mampu melipat gandakan harga hingga menjadi tiga kali lipat (Amalia, 2013:475).

Data menarik yang dipaparkan oleh Nazara (2010) menyebutkan bahwa ada dimensi *gender* dalam sektor informal. Menurutnya, dalam sektor informal perempuan menguasai informalitas di segmen bawah, sementara laki-laki mendominasi segmen atas. Argumen ini tampaknya diperkuat oleh Gallaway dan Bernasek (dalam Nazara, 2010:25) yang

menegaskan bahwa perempuan Indonesia yang bekerja di Sektor Informal adalah kaum perempuan yang tidak memiliki peluang lain, berpendidikan rendah dan berpenghasilan minim. Untuk mengetahui bagaimana sektor bawah dan sektor atas, dapat disimak melalui ilustrasi gambar berikut.



**Gambar 3.** Segmentasi Sektor Informal  
Sumber: diolah dari Chen (dalam Nazara, 2010)

Gambar 3, memberikan ilustrasi yang cukup jelas bahwa segmentasi sektor informal berbanding lurus dengan penghasilan dan jenis kelamin. Pengusaha informal berada pada posisi paling atas dengan penghasilan yang tinggi, dan mayoritas dari pengusaha informal adalah laki-laki. Sedangkan pekerja lepas berada dalam posisi paling bawah dengan jumlah paling banyak dan penghasilan yang

rendah. Kondisi ini diperparah dengan proporsi yang ada didalamnya, dimana mayoritas pekerja adalah perempuan. Artinya, peran perempuan dalam sektor informal sebagian besar hanyalah sebagai pekerja lepas yang membantu para pengusaha informal. Namun perempuan memiliki peran yang cukup besar dalam roda ekonomi informal, tetapi kondisi mereka tidak lebih baik daripada laki-laki karena perempuan berada dalam segmen bawah dengan penghasilan paling rendah.

Apabila melihat kembali dalam konteks Sarkem, hal ini memiliki keterkaitan yang erat dimana para pekerja seks komersial (PSK) menempati posisi sebagai pekerja lepas. Keberadaan PSK sebagai pekerja lepas memiliki pendapatan yang lebih kecil daripada mucikari, karena PSK harus menyetorkan beberapa uang hasil mereka bermalam dengan pelanggan. Selain itu ada biaya lainnya yang harus disetorkan oleh PSK kepada mucikarinya, seperti biaya tempat tinggal, hutang, biaya losmen dengan pelanggan, dan lain-lain.

Para PSK yang sudah masuk dalam dunia prostitusi akan kesulitan untuk keluar dari gemerlap dunia tersebut. Hal ini disebabkan oleh para mucikari yang menampung dan mempekerjakan mereka, memberikan hutang dengan sistem bunga. Uang tersebut diberikan sebagai pemenuh kebutuhan awal para pelacur. Sejumlah uang yang diberikan tersebut biasanya tidak hanya menyelesaikan masalah kemiskinannya (hutang kepada rentenir), tetapi juga untuk membiayai penampilan mereka agar layak bertemu pelanggan dan mampu menarik perhatian tamu (Prasetya dan Darma, 2010:49-50).

Dalam sektor informal, terdapat pandangan tersendiri bagi seorang perempuan yang telah memiliki anak. Biasanya perempuan yang sudah memiliki anak akan memiliki beban terhadap tanggung jawab membesarkan anak. Kondisi ini menyebabkan apa yang disebut dengan 'beban ganda' terhadap perempuan. Di satu sisi perempuan harus mengurus rumah tangga, tetapi di sisi lain perempuan

juga harus bekerja memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Wacana mengenai kesetaraan gender memang sangat bias di Sarkem. Bagaimana tidak? Perempuan sebagai pelacur dikomodifikasi menjadi sebuah benda bernilai untuk dieksploitasi. Selain itu juga terdapat stereotipe, objektifikasi, subordinasi, marginalisasi terhadap perempuan-perempuan di Sarkem dalam melakukan pekerjaannya.

Selain biaya sosial seperti yang disebutkan diatas, terdapat biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh para perempuan Sarkem. Seperti implikasi psikologis dari seorang anak, hal ini akan menjadi biaya tambahan dari kegiatan prostitusi ini. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang lingkungan dimana anak dari perempuan-perempuan di Sarkem membesarkan anaknya. Selain itu, lingkungan tersebut juga tidak sehat untuk membesarkan seorang anak. Problem ini terjadi tidak hanya pada anak dari seorang pelacur saja, namun juga anak dari pedagang kaki lima yang kesehariannya

berada di lingkungan Sarkem. Dalam lingkungan seperti ini, anak juga akan mengalami proses internalisasi dimana simbol (suara, gambar, gerakan) dari para PSK, mucikari, dan preman akan dilihat dan didengarkan setiap harinya.

Biaya yang besar terhadap masa depan anak dari para perempuan dalam sektor informal Sarkem ini tampaknya tidak seimbang dengan materi yang mereka peroleh. Realitanya, perempuan-perempuan tersebut masih tetap berada dalam kondisi miskin. Namun, mereka tetap mensyukuri adanya Sarkem sebagai lahan penghasilan rumah tangga mereka. Bagi para perempuan di Sarkem baik pelacur, pedagang kaki lima, penjaga parkir, penyedia losmen—keberadaan Sarkem adalah berkah tersendiri. Berkah itu diukur dengan adanya pengunjung yang ingin mampir ke Sarkem, karena secara otomatis setiap sisi dari sayap ekonomi informal di Sarkem akan kecipratan bagiannya masing-masing.

Geliat sektor informal di Sarkem yang dilakukan oleh perempuan mampu berkontribusi bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Rahayu dalam penelitiannya mengenai kontribusi perempuan dalam sektor informal. Menurutnya ada hubungan positif antara pendapatan keluarga dan pendapatan perempuan dalam sektor informal, artinya jika pendapatan perempuan pekerja meningkat maka pendapatan keluarga juga meningkat (Rahayu, 2008:232). Kondisi ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam sektor informal memiliki peran dan kontribusi yang besar bagi pengurangan angka kemiskinan. Selain itu, perempuan juga masih harus mengurus urusan rumah tangga mereka. Sehingga, jika pendapatan keluarga dihitung berdasarkan jumlah anggota keluarga yang bekerja maka perempuan sebagai aktor dalam sektor informal akan memberikan kontribusi positif daripada hanya berada dalam sektor domestik. Selain itu, perempuan juga

berkontribusi dalam melawan kemiskinan dan pengangguran.

### **Repertoar Ordonansi Prostitusi:**

#### **Mengikis Eksistensi Sektor Informal?**

Permasalahan di Sarkem merupakan permasalahan yang menyangkut kesesuaian atas nilai dan norma sosial. Keberadaan para pedagang kaki lima, penjaga parkir, dan pemilik warung mungkin tidak akan menjadi masalah bagi masyarakat. Namun berbeda halnya dengan keberadaan para PSK yang ada di Sarkem. Stigma negatif tentunya selalu menghinggapi mereka, karena pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang dianggap ilegal (tidak sah). Tetapi dalam realitanya, tanpa ada PSK, Sarkem mungkin tidak akan menjadi sebuah wilayah yang mampu membangun sistem ekonomi informal sebesar itu. Hal ini disebabkan oleh daya tarik PSK yang membuat Sarkem memiliki keistimewaan tersendiri.

Secara hukum, keberadaan Sarkem tidak menyalahi Perda DIY Nomor 18

Tahun 1954 tentang larangan pelacuran ditempat-tempat umum. Dalam perda tersebut tertera pada pasal 1 dan pasal 2 mengenai pengertian pelacuran dan tempat-tempat pelacuran yang dilarang oleh hukum. Seperti misalnya dikatakan dalam pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan pelacuran ialah: Tindakan orang-orang yang menyerahkan badannya untuk berbuat zina dengan mendapat upah. Sedangkan dalam pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud tempat-tempat umum ialah jalan-jalan, tanah-tanah lapang, ruangan-ruangan dan lain sebagainya yang oleh umum mudah dilihat atau didatangi. Di sini jelas bahwa adanya Sarkem merupakan sebuah tempat terkonsentrasi yang dikhususkan untuk melakukan jual-beli jasa hubungan seks. Adanya Sarkem guna menghindari transaksi yang berada diluar ruangan (umum) atau yang disebutkan dalam pasal 2 (tempat lapang, umum, mudah dilihat, atau didatangi). Faktanya, keberadaan Sarkem bertujuan untuk menutupi perbuatan zina di depan khalayak umum.

Namun, ketika melihat kebijakan lainnya mengenai prostitusi masih terdapat paradoks yang sering dianggap menyudutkan keberadaan lokalisasi. Misalnya pembubaran Gang Dolly sebagai lokalisasi terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, sehingga menyebabkan pro dan kontra dalam masyarakat. Terkadang kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani permasalahan prostitusi dianggap tidak bijak, karena pembuat kebijakan tidak memikirkan implikasi kedepannya. Pembubaran Gang Dolly misalnya, hal ini dikhawatirkan oleh para pengamat sosial bahwa penyebaran PSK akan membuat *social disorder* karena keberadaan para PSK tidak terkonsentrasi dalam satu wilayah lagi, tetapi menyebar ke segala arah. Hal ini juga akan berimplikasi pada penyebaran virus HIV & AIDS. Namun dalam konteks Sarkem saat ini, sepertinya kecil peluang untuk membubarkan Sarkem seperti Gang Dolly. Hal ini berkaitan dengan PERDA DIY Nomor 18 Tahun 1954 tentang larangan



pelacuran ditempat-tempat umum, yang masih digunakan sampai saat ini.

Justru kondisi yang terjadi adalah adanya probabilitas migrasi PSK dari Dolly ke Sarkem. Para pekerja sektor informal tidak sah Dolly yang merasa kehilangan pekerjaannya kemungkinan akan bermigrasi ke Sarkem untuk mencari lahan pekerjaan baru. Namun, hal ini mendapat penolakan dari Komunitas PSK Yogyakarta. Seperti diungkapkan oleh SRM (Ketua Komunitas PSK Yogyakarta) bahwa ia merasa khawatir seandainya para PSK Dolly datang ke Sarkem, karena Sarkem ukuran wilayahnya hanya kecil, ditakutkan bahwa PSK Dolly akan memenuhi kampung Sosrowijayan. Selain itu warga Sosrowijayan juga memiliki kesepakatan dengan para pemilik losmen dan mucikari untuk tidak menerima pendatang baru lagi dari luar.

Apabila seandainya terjadi pembubaran lokalisasi Sarkem maka akan ada ketidakseimbangan dalam tatanan sosial di Yogyakarta. Kondisi tersebut merupakan

implikasi dari pembubaran lokalisasi hingga menyebabkan persebaran PSK yang tidak terkontrol. Seandainya ada PERDA DIY yang baru dan tujuannya membubarkan Sarkem seperti yang terjadi pada Gang Dolly, maka tidak hanya kemiskinan yang semakin meningkat tetapi peluang terjadinya lokalisasi ilegal di berbagai tempat di Yogyakarta. lokalisasi ilegal akan masuk ke dalam perkampungan miskin dengan dalih memecahkan masalah kemiskinan. Pengaruh lainnya dari banyaknya lokalisasi ilegal adalah implikasi sosial seperti lingkungan yang tidak sehat bagi pertumbuhan anak-anak, serta penyebaran virus HIV & AIDS dikalangan masyarakat.

Selain peraturan dari pemerintah, ada pandangan normatif tentang agama yang juga ikut berkuat dalam penerapan kebijakan operasionalisasi Sarkem. Untuk menghormati umat islam yang melakukan ibadah puasa di bulan ramadhan, biasanya Sarkem ditutup untuk beberapa saat. Lalu bagaimana implikasi terhadap para pelaku

sektor informal? Bagi para pelaku sektor informal tidak sah hal ini tentu saja akan berimplikasi pada pendapatan mereka karena para PSK tentunya dipaksa untuk libur oleh pihak berwajib, bahkan ormas tertentu juga sering ikut bagian menjadi aparat penertib. Menurut salah satu pengurus Sarkem, “tradisi” meliburkan PSK dan menutup Sarkem tiap menjelang dan awal Ramadan ini sudah menjadi kesepakatan dan akan dikenakan denda terhadap yang melanggarnya. Hal ini tentunya merugikan para PSK secara materi karena durasi berjalannya ramadhan cukup lama dan otomatis mereka tidak memiliki pendapatan sama sekali di hari tersebut. Apalagi ada tuntutan untuk mengirim uang THR (Tunjangan Hari Raya) bagi keluarganya yang di kampung. Sedangkan bagi para pelaku sektor informal sah, hal ini juga akan berimplikasi pada pendapatan mereka karena Sarkem sepi akan pengunjung dan tidak ada yang mampir ke dalam usaha warung makan mereka.

Profesi sebagai PSK bukanlah suatu yang didambakan oleh seorang perempuan, namun apa daya kebutuhan untuk menyambung nyawa setiap harinya menuntut mereka harus memiliki penghasilan. Sehingga menjadi PSK sering dianggap sebagai alternatif tercepat untuk mendapatkan uang. Pekerjaan yang dilematis ini sesungguhnya ingin diakhiri oleh beberapa PSK. Misalnya YL, salah seorang PSK asal Purwokerto yang telah bergelut selama 15 tahun sebagai pelacur di Sarkem. Sesungguhnya YL ingin berhenti dari pekerjaan tersebut, namun ada kendala yang dihadapi apabila ia berhenti dari dunia prostitusi. Kendala tersebut adalah keterampilan (skill). YL sangat menginginkan adanya program pelatihan keterampilan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan harapan, apabila ia mendapatkan program pelatihan maka ia akan memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk membuka usaha dan pekerjaan lainnya.

Kondisi diatas menunjukkan adanya keinginan dari para pelaku sektor informal tidak sah untuk beralih ke sektor informal sah. Namun yang menjadi kendala adalah keterampilan. Mereka tidak memiliki keterampilan dalam bidang yang lain, sehingga diperlukan waktu untuk melakukan pelatihan keterampilan bagi mereka. Namun ada suatu peraturan yang aneh dari pemerintah, bahwa warga yang tidak memiliki KTP asli Yogyakarta tidak dapat memperoleh program pelatihan dari pemerintah.

Dinamika ordonansi mengenai lokalisasi sejatinya hanya ditujukan pada lokalisasi tersebut, namun implikasinya menular ke segala arah. Sektor informal sah yang kesehariannya bergantung pada sektor informal tidak sah di Sarkem mengalami penurunan pendapatan apabila operasionalisasi lokalisasi mengalami hambatan yang biasanya karena ordonansi yang tidak pro terhadap sektor informal tidak sah. Sehingga, ordonansi yang mengancam Sarkem sama dengan artinya

mengancam aktivitas ekonomi lainnya yang berada di sekitar Sarkem. Hal ini dikarenakan terjadinya hubungan simbiosis mutualisme antara sektor informal sah dan sektor informal tidak sah, yaitu warung-warung dan tukang parkir dengan lokalisasi Sarkem. Sehingga dapat tercerminkan bahwa ordonansi yang ada saat ini cenderung netral karena implementasi ordonansi tentang lokalisasi yang ada di Yogyakarta masih belum menampakkan sifat represifnya.

#### **SIMPULAN**

Keberadaan lokalisasi Sarkem sebagai jantung sektor informal tidak sah memiliki implikasi positif terhadap ekonomi informal sah dimana usaha-usaha seperti warung, penjaga parkir, dan usaha lainnya mendapat keuntungan dari pengunjung yang berdatangan ke lokalisasi Sarkem. Hubungan simbiosis mutualisme yang terjadi antara sektor informal sah dan tidak sah ini telah berhasil mengatasi masalah ketenagakerjaan di wilayah itu. Sehingga sektor informal di wilayah

Sarkem mampu menyerap tenaga kerja perempuan yang cukup besar dengan berbagai macam profesi. Dilihat dari sisi ekonomi, sektor informal di Sarkem mampu memberdayakan tenaga kerja perempuan secara masif dan dapat dikatakan berhasil. Namun dari sisi kesehatan, keberadaan Sarkem sebagai lokalisasi sekaligus sektor informal tidak sah cukup memberikan keresahan.

Tampaknya upaya pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah alternatif untuk memutus mata rantai kemiskinan di Sarkem. Dengan upaya ini, masyarakat bukan lagi menjadi objek dalam pembangunan, tetapi menjadi subjek yang diberi kewenangan mengarahkan laju pembangunan. Ada tiga tahapan yang diperlukan dalam melakukan pemberdayaan tersebut. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kedua, memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki masyarakat serta menyediakan sarana dan prasarana

yang mampu menopang kehidupan secara baik. Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah (Kartasasmita dalam Rolis, 2013:98). Tingginya animo atas program pemberdayaan terlihat dari keinginan yang muncul dari beberapa PSK untuk berhenti menjadi PSK dan berharap mendapatkan program pelatihan dari pemerintah, dengan harapan mereka dapat mengembangkan sebuah usaha baru atau memperoleh suatu pekerjaan. Selain itu anak-anak yang ada di wilayah Sarkem, yang notabene menjadi generasi penerus bangsa dapat ikut andil dalam pengembangan dan memajukan kualitas bangsa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Fakhriza. 2022. "Gender Wage Gap: Evidence from Employment in Informal Sector." *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning* 3(2):104–17. doi: 10.46456/jisdep.v3i2.301.
- Amalia, Astry Sandra. 2013. *Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (Psk) Terhadap Masyarakat Sekitar: Studi Kasus di Jalan Soekarno-Hatta Km.10 Desa Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara*. eJournal Administrasi Negara, Vol. 1, No. 2. Hlm. 465-478.

- Artosa, Odam Asdi. 2018. "Pekerja Migran Dan Ekonomi Informal Ilegal (Prostitusi) Di Wilayah Pasar Kembang, Yogyakarta." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 5(1):21–36. doi: 10.22146/jps.v5i1.35400.
- Asian Development Bank, dan BPS. 2011. *The Informal Sector and Informal Employment in Indonesia*. Manila: ADB.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Konsep Penduduk Miskin*. Jakarta.
- D'Amico, Stefano. 2005. "Shameful Mother: Poverty and Prostitution in Seventeenth-Century Milan." *Journal of Family History* 30(1):109–20. doi: 10.1177/0363199004270554.
- Effendi, Tadjudin Noer. 1995. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Effendi, Tadjudin Noer. 1995. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Harahap, Syaiful W. 2014. Dengan Rp 25.000 Bisa Tularkan HIV/AIDS di "Sarkem" Yogyakarta. diakses <http://www.aidsindonesia.com/2014/06/dengan-rp-25000-bisa-tularkan-hiv-aids.html> tanggal 1 Januari 2016. Pukul 23.44 WIB.
- Hart, Keith. 1985. "The Informal Economy." *Cambridge Anthropology* 10(2):54–58.
- Joshi, Ranjila, Pernille Tanggaard Andersen, Subash Thapa, dan Arja R. Aro. 2020. "Sex Trafficking, Prostitution, and Increased HIV Risk among Women during and after the 2015 Nepal Earthquake." *SAGE Open Medicine* 8:2050312120938287. doi: 10.1177/2050312120938287.
- Kusuma, Wijaya. 2014. *Kencan di Sarkem Tak Pakai Kondom Didenda Rp 25.000*. Kompas  
19 Juni 2014 diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2014/06/19/2210260/Kencan.di.Sarkem.Tak.Pakai.Kondom.Didenda.Rp.25.000> tanggal 1 Januari 2016. Pukul 23.22 WIB.
- Mahfudh, Sahal. 2007. *NUANSA FIQIH SOSIAL*. Yogyakarta: LkiS.
- Mahmud, Fahmi. 2014. *Warga Sarkem Tolak Kedatangan Penghuni Dolly*. Liputan6.com 21 Juni 2014 diakses <http://news.liputan6.com/read/2066629/warga-sarkem-tolak-kedatangan-penghuni-dolly> 04 Januari 2016, pukul 12.26 WIB
- Nazara, Suahasil. 2010. *Ekonomi Informanl di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi*. Jakarta: ILO.
- Pemerintah Daerah DIY. 2016. *Produk Hukum Provinsi DIY*. Yogyakarta. Diakses dari <http://www.birohukum.jogjaprov.go.id/produk/index.php?dir=Perda/1950-1959&by=name&order=desc> 02 Januari 2016, pukul 21.00WIB.
- Prasetya R. K, Cornelius. dan Darma, Adi. 2011. *DOLLY: KISAH PILU YANG TERLEWATKAN*. Yogyakarta: Pustaka Pena.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rolis, Moh. Ilyas. 2013. *SEKTOR INFORMAL DAN IKHTIAR PEMBERDAYAAN*. *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3, No. 2, Hlm. 93-111.
- Saleh, Ismail. Maiwan, M. Dan Raharjo. 2013. *Kehidupan Prostitusi Remaja dan Solusi Penanggulangan*. *Jurnal PPKN UNJ ONLINE*, Vol. 1, No. 2, Hlm. 1-7.

Siswanto, Bestyan Breny. 2013. *Prostitusi di Sosrowijayan Yogyakarta: Studi Interaksi Pekerja Seks Komersial Pasar Kembang dengan Masyarakat Sosrowijayan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Sutriyati. 2015. *15 Tahun Menggeluti Dunia Prostitusi, Ini Pengakuan PSK Sarkem Yogya*. Kabar Kota 10 Juni 2015 diakses <http://www.kabarkota.com/berita-3595-15-tahun-menggeluti-dunia-prostitusi-ini-pengakuan-psk-sarkem-yogya.html> 02 Januari 2016, pukul 18.47 WIB.

Wicaksono, Pribadi. 2015. *Sambut Ramadan, PSK Sarkem, Yogyakarta, Gelar Pengajian*. Tempo 10 juni 2015 diakses

<http://ramadan.tempo.co/read/news/2015/06/10/155673796/sambut-ramadan-psk-sarkem-yogyakarta-gelar-pengajian> 02 Januari 2016, pukul 18.13 WIB